



Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2020-2024

Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Disampaikan dalam:

**Bincang Media: Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkualitas
Jakarta, 15 Agustus 2019**

Outline



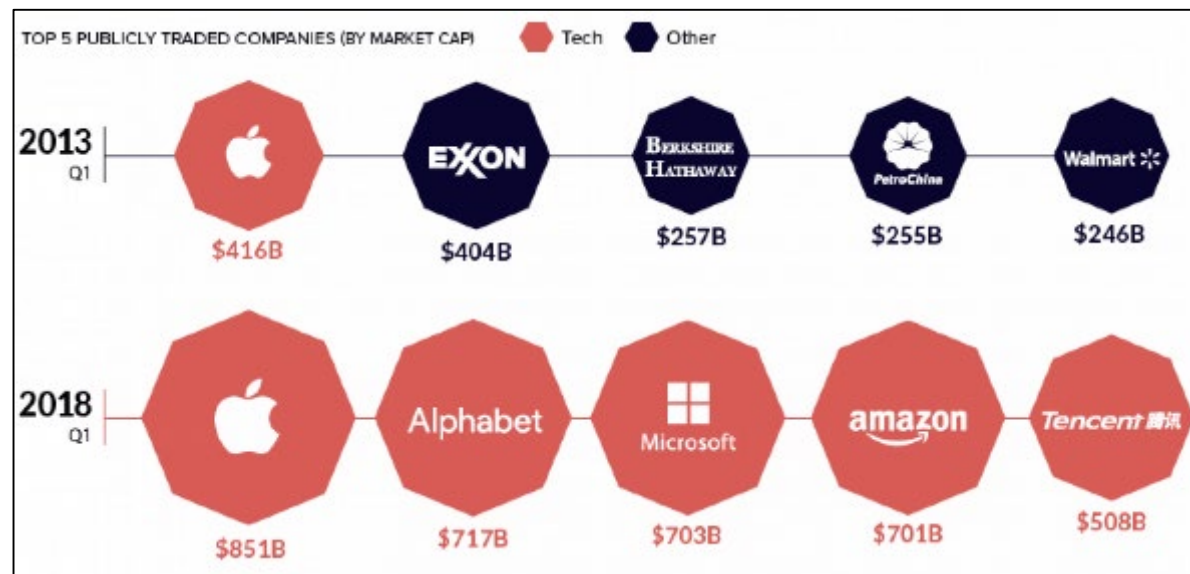
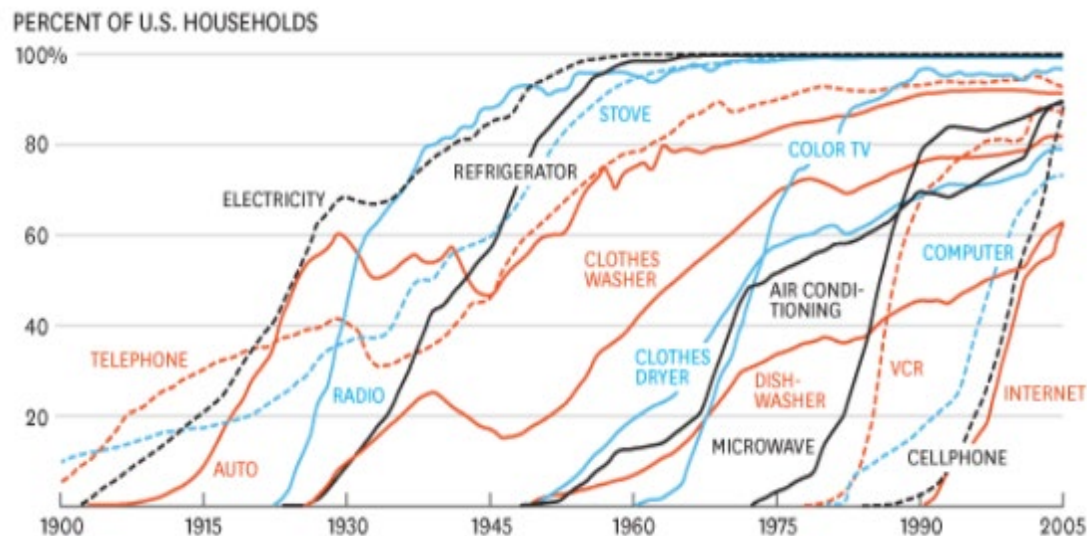
Perkembangan Ekonomi Digital



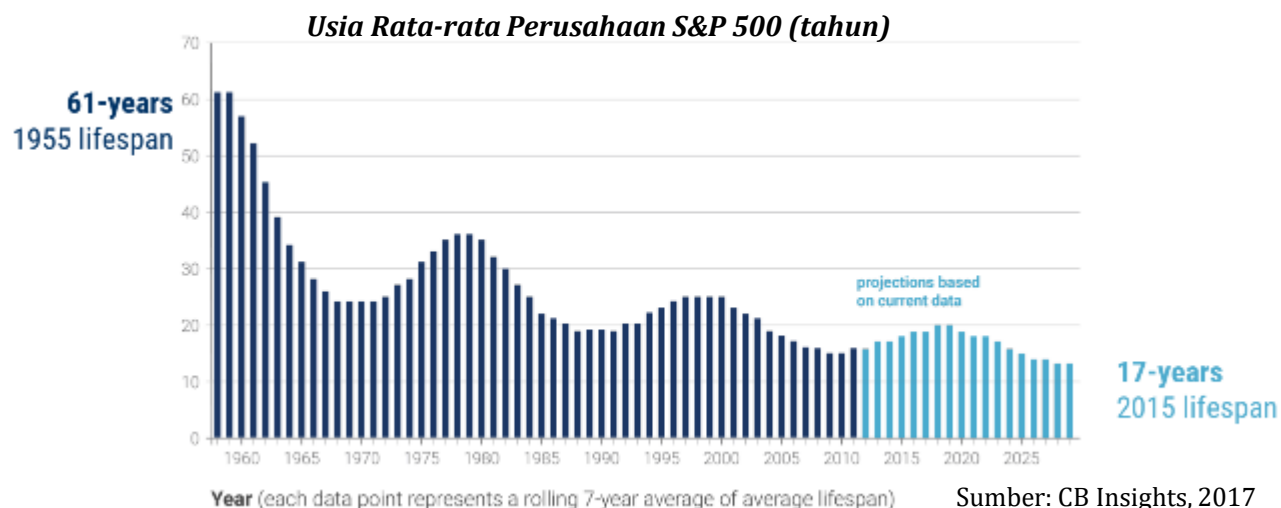
Lebih Cepat dan Lebih Baik: Adopsi Teknologi Mengikuti Rute Non-Tradisional

Tren global:

- Perusahaan teknologi mendominasi dalam kurun Dunia Usaha.
- Waktu yang dibutuhkan perangkat elektronik untuk mencapai adopsi massal semakin cepat, dan **hanya kurang dari 5 tahun bagi media sosial untuk menjadi fenomena global.**
- Teknologi juga **membawa persaingan** lainnya ke pasar – usia rata-rata perusahaan S&P 500 secara signifikan menurun kurang dari 20 tahun dalam 5 dekade.



Sumber: World Bank, ycharts, CB Insights, iabaustralia.com.au



Sumber: CB Insights, 2017

Jumlah Usaha di Sektor Ekonomi Digital di Indonesia



992 STARTUP INDONESIA

BIDANG USAHA



352 STARTUP
DI BIDANG
E-COMMERCE

35,48%



53 STARTUP
DI BIDANG
FINTECH

5,34%



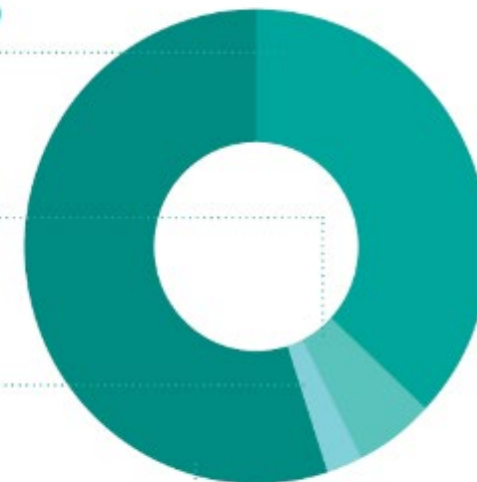
55 STARTUP
DI BIDANG
GAME

5,54%



532 STARTUP
DI BIDANG
LAINNYA

53,63%



Unicorns: Perusahaan Startup Bernilai Tinggi

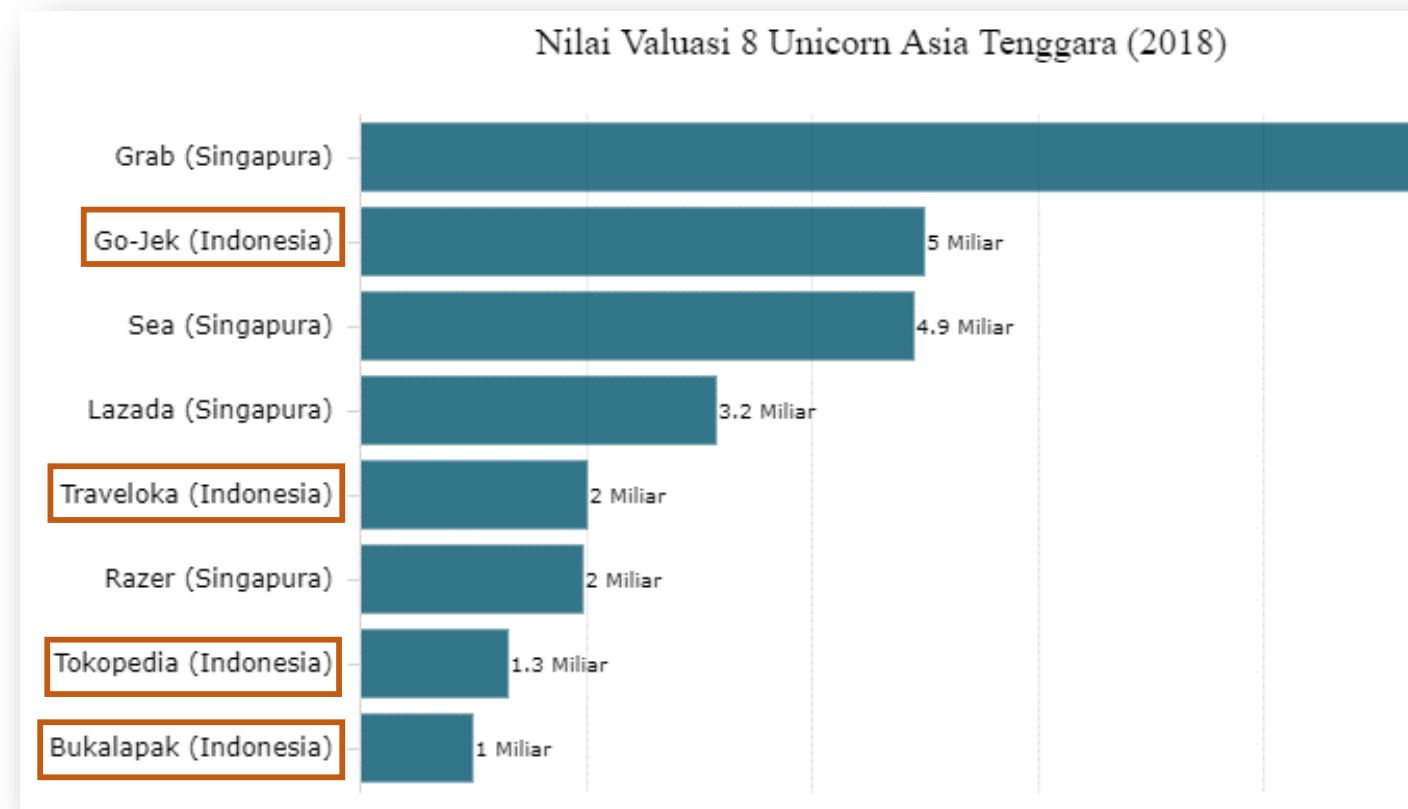
Secara Global, hingga Maret 2019, nilai pasar kumulatif seluruh *unicorns* sekitar USD 1.038 miliar — kira-kira setara dengan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Laju pertumbuhan *unicorns* tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Sedikitnya 50 atau lebih *startup* diproyeksikan mencapai nilai USD 1 miliar.

50 Unicorns Masa Depan



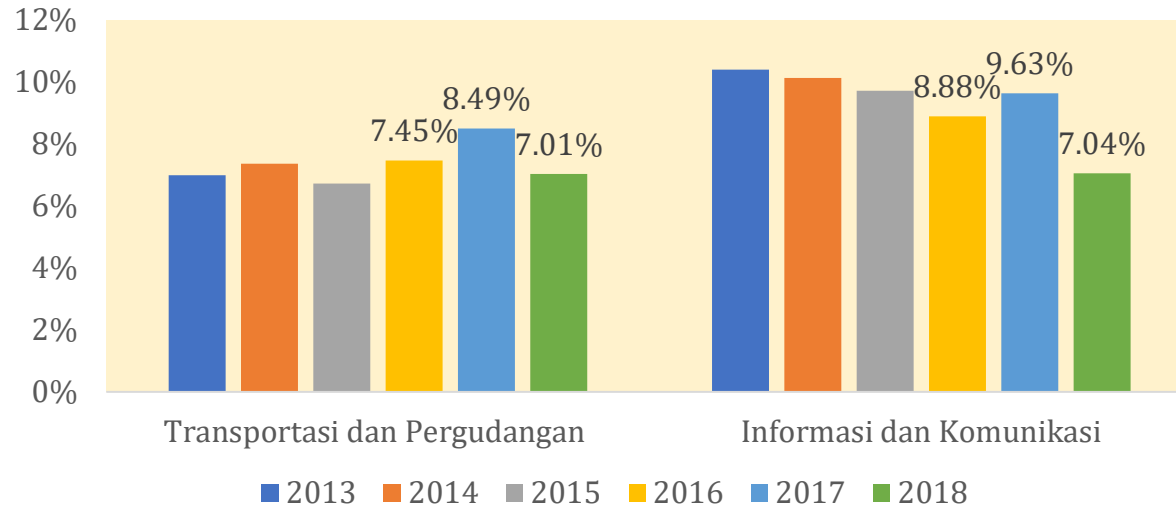
Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki unicorn paling banyak (*startup* dengan penilaian lebih dari US \$ 1 miliar) di wilayah Asia setelah China dan India



Sumber: *thesoutheastasia.com*, "Evolving Southeast Asia", 2018

Ekonomi Digital Memberikan Dampak Signifikan ke Ekonomi

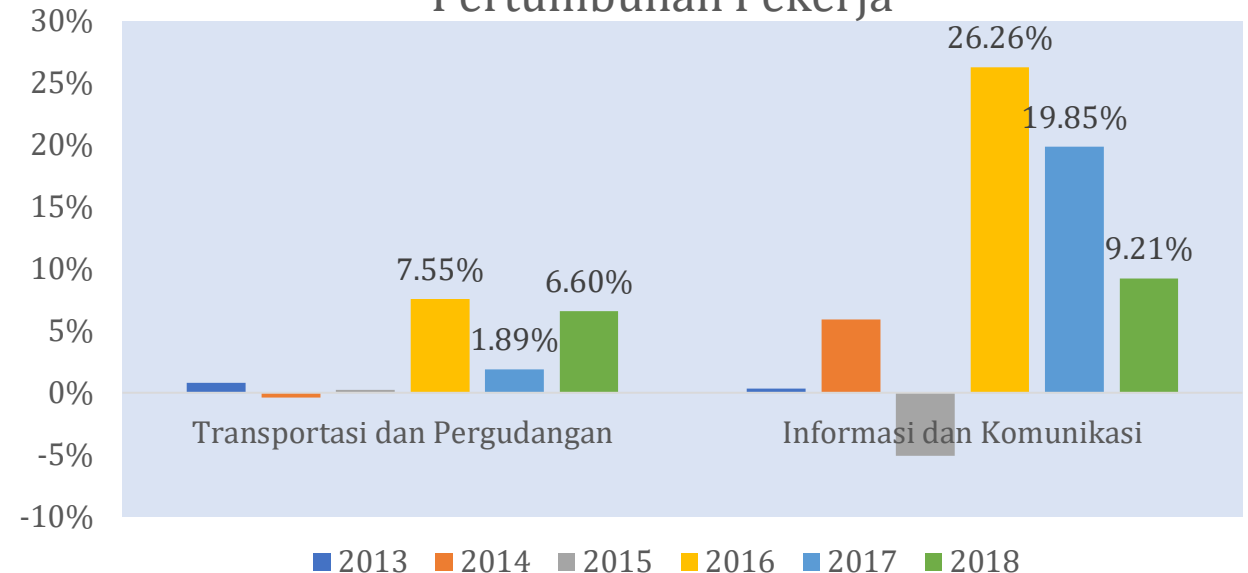
Pertumbuhan Ekonomi



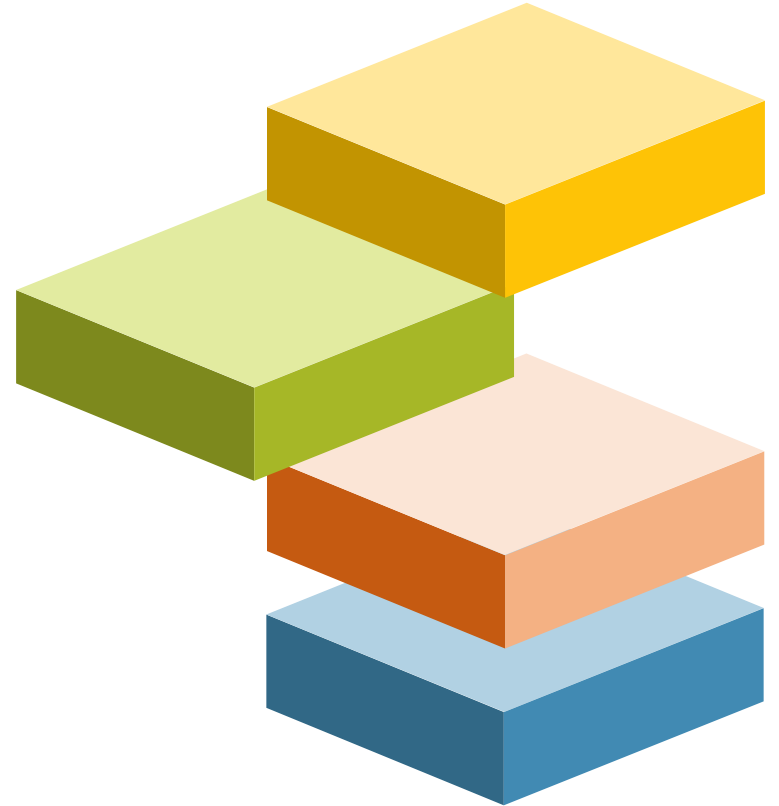
- **Sektor transportasi dan pergudangan** juga tumbuh lebih dari 7%. Pertumbuhan yang tinggi ini salah satunya didorong pertumbuhan *e-commerce* dan transportasi *on-demand* seperti Gojek dan Grab.

- **Sektor Informasi dan Komunikasi** masih melanjutkan tren pertumbuhan di atas 7%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi indikasi peningkatan peran ekonomi digital.
- Pertumbuhan tenaga kerja sektor TIK juga meningkat pesat. Tahun 2018 meningkat 9,21%.

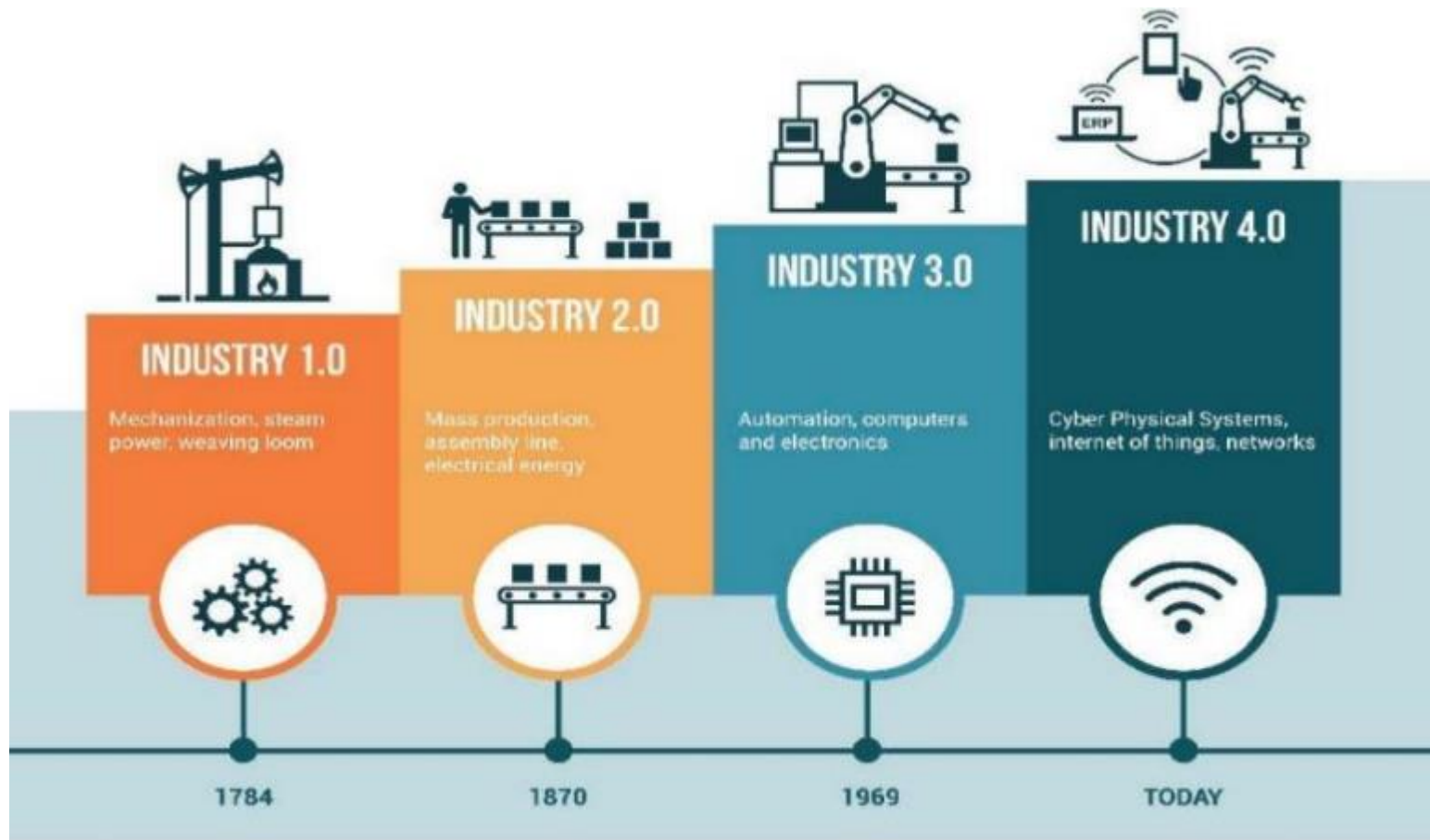
Pertumbuhan Pekerja



Tantangan dan Peluang Ekonomi Digital



Perkembangan Digitalisasi melalui Industri 4.0 Menciptakan Tantangan Berbeda Antar Negara



**Pergeseran
semakin cepat**

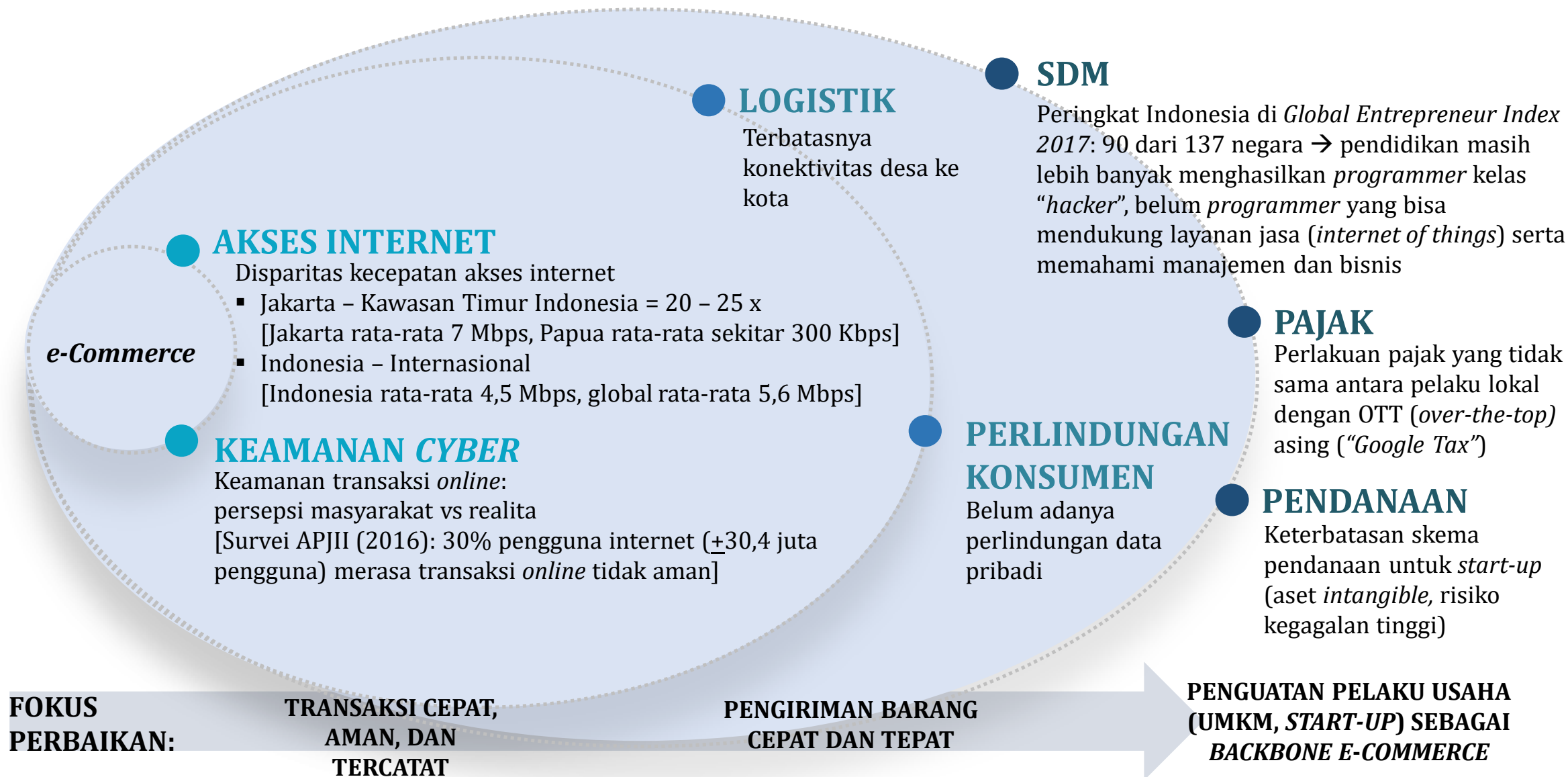
Negara-negara maju

- Resiko sistemik
- *Governance*
- Permasalahan koordinasi dengan sektor swasta

Negara-negara berkembang

- Biaya tinggi untuk implementasi industri 4.0
- Menghubungkan daerah terpencil dengan kepadatan penduduk rendah: *Cost of Connectivity*
- Kesulitan menciptakan kesempatan kerja baru (dampak adanya transformasi)

Tantangan Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia: *e-Commerce*



Tantangan Pekerjaan Masa Depan: Teknologi Digital dan Otomatisasi Menciptakan Timbulnya Pekerjaan Baru

Digitalisasi Marketplace



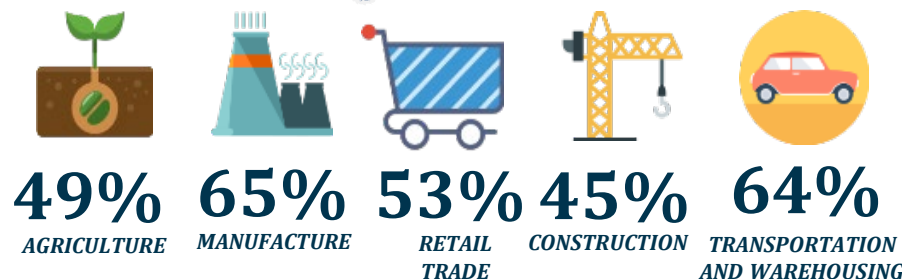
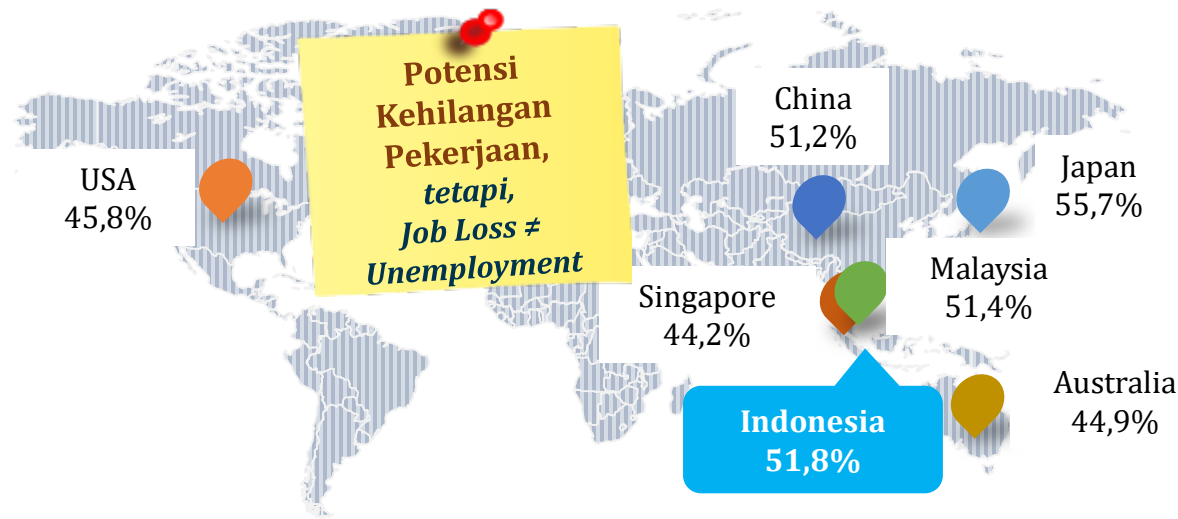
Digitalisasi Pariwisata



Digitalisasi Pendidikan



Digitalisasi Pasar Kerja

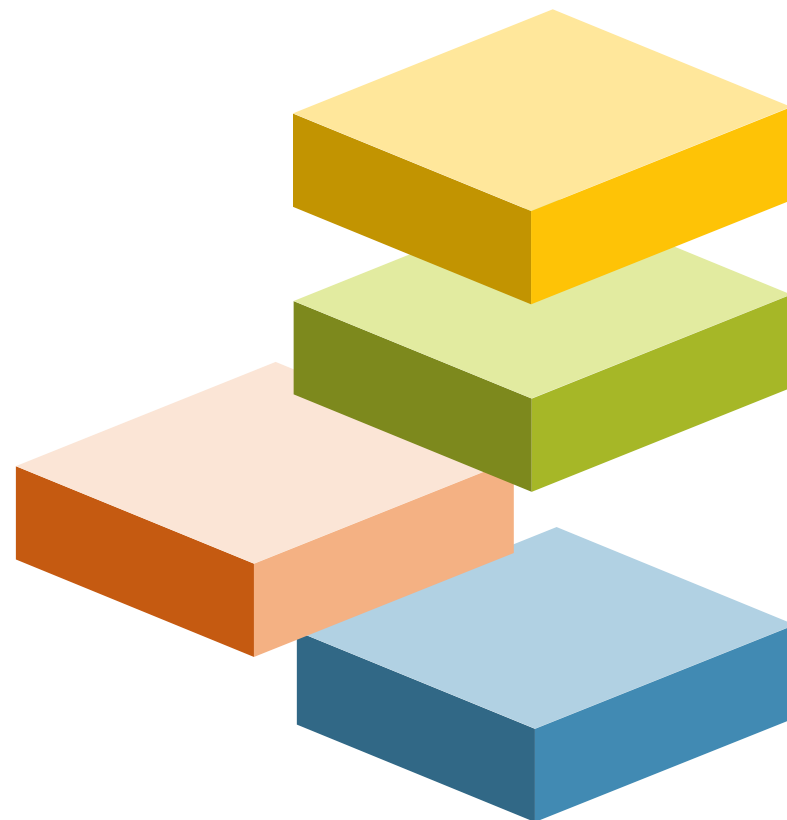


Potensi otomatisasi berdasarkan sektor

Potensi otomatisasi berdasarkan sektor

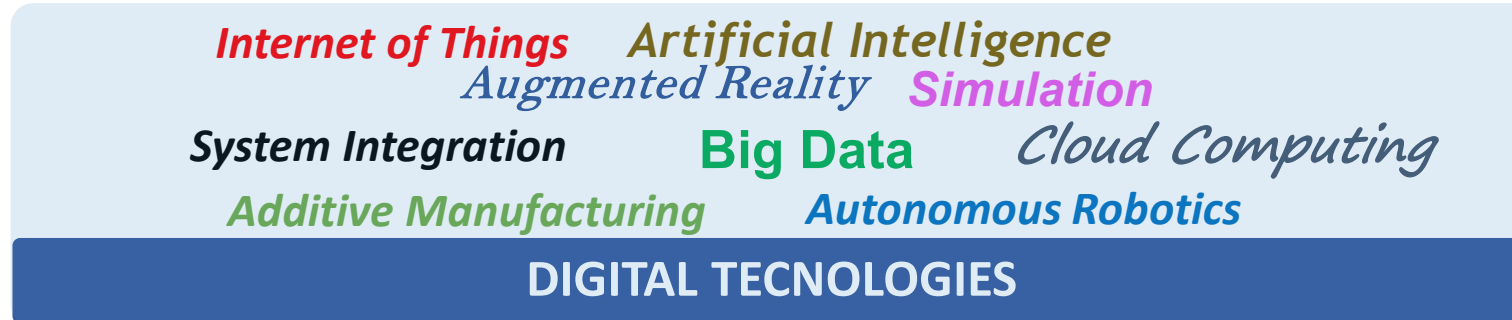


Ekonomi Digital untuk Kesejahteraan Masyarakat



Diperlukan Upaya Kolektif untuk Menciptakan Inklusi, Efisiensi, dan Inovasi di Era Digital

Pendekatan Komprehensif untuk Mendapat
Manfaat dari Digitalisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan
Lingkungan Berkelanjutan



	INCLUSION	EFFICIENCY	INNOVATION
BUSINESSES	Trade	Capital Utilization	Competition
PEOPLE	Job Opportunities	Labor Productivity	Consumer Welfare
GOVERNMENT	Participation	Public Sector Capability	Voice

Kebijakan yang ada

- UU No. 11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik
- PP 82/2012: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Perpres 74/2017: Roadmap *E-commerce* 2017-2019;
- Perpres 95/2018: *e-government*
- Berbagai peraturan terkait *e-commerce*, transportasi online, *fintech* dan digitalisasi penyaluran bantuan pemerintah
- Proposal Indonesia untuk memasukkan maksimalisasi manfaat dari digitalisasi dan teknologi yang muncul untuk pertumbuhan dan produktivitas inovatif diterima dalam deklarasi HLM G20 pada tahun 2018.

Pemanfaatan TIK untuk Pemerataan Pembangunan

Penetrasi Internet dan Telepon Seluler di Indonesia



Pengguna Internet pada 2017: **143.26 juta orang (54.7%)**



Kepemilikan telepon pintar/gawai tablet: **50.1%**

Distribusi Program Kesejahteraan Sosial

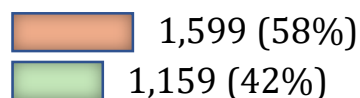


Distribusi Bantuan Non-Tunai menjadi lebih tepat waktu dan tepat sasaran (dalam konteks jumlah yang diterima):

- Distribusi Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT): **4.8 juta penerima di 44 kabupaten/kota (2018)**
- Program Keluarga Harapan (PKH): **10 juta keluarga penerima di 511 kab/kota (2018)**

Fasilitas Kesehatan

Rumah Sakit (2,758)



Rumah Sakit dengan Akses Internet
Rumah Sakit tanpa Akses Internet

Puskesmas (9,754)



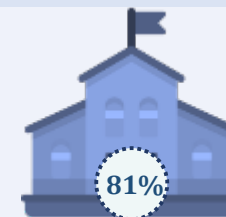
Puskesmas dengan Akses Internet
Puskesmas tanpa Akses Internet

TIK mendukung pelaporan pemanfaatan BPJS Kesehatan yang lebih cepat dan akurat, pelaporan mengenai kondisi fasilitas dan infrastruktur kesehatan, serta terbukanya kesempatan pada kesetaraan akses kesehatan melalui teknologi tele-medisin dan pelacakan lokasi fasilitas kesehatan.

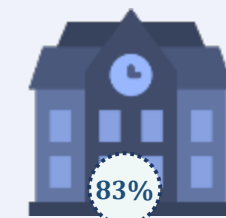
Fasilitas Pendidikan

Dengan Internet

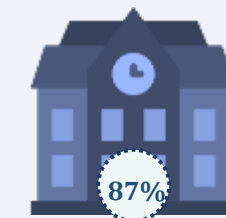
Tanpa Internet



SMP



SMA



SMK



Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada semua tingkat pendidikan (SMP, SMA, SMK) pada tahun 2018: 6.3 juta siswa (meningkat 70% dari tahun 2017).

Infrastruktur Digital di Indonesia

Pembangunan jaringan 4G melalui proses *refarming* spektrum yang sudah ada



82.3%

Cakupan 4G di seluruh kota di Indonesia

Membangun Proyek Palapa Ring untuk menghubungkan serat optik ke setiap kota



93 %

Seluruh kota terhubung

Menyediakan akses infrastruktur bagi mereka yang berada di area non komersial



1,086

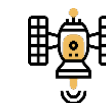
Base Transceiver Stations di perbatasan atau daerah tertinggal



4,111

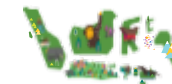
Akses internet untuk sekolah, fasilitas kesehatan, perkantoran

Membangun satelit nasional untuk akses internet di daerah terpencil



150 Gbps

High Throughput Satellite



140,000

Layanan di seluruh negeri

Mempercepat Akses Pemangku Kepentingan pada Pemanfaatan Ekonomi Digital



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Mendorong UMKM untuk memasuki usaha *online*



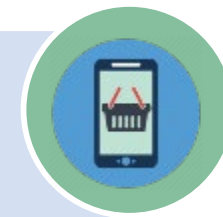
The Next Indonesian Unicorn

Mempercepat pertumbuhan *start-up* menengah-atas untuk berinteraksi dengan investor besar di level global



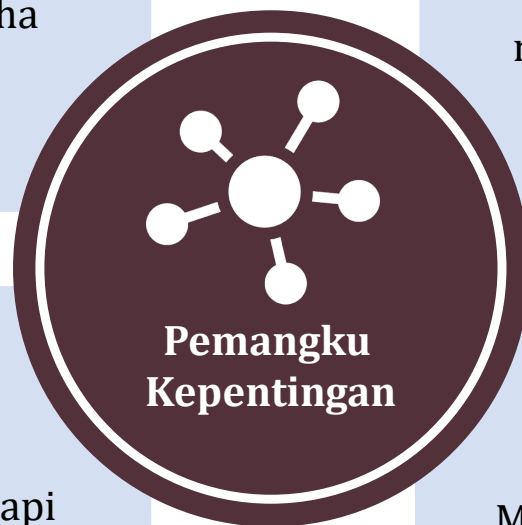
Nelayan dan Petani

Membantu petani dan nelayan menghadapi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas serta meningkatkan dan memperluas penjualan



e-Commerce

Menerapkan peta jalan *e-commerce* bersama dengan seluruh pemangku kepentingan yang relevan



Sasaran dan Kebijakan Tahun 2020-2024



Kebijakan Pembangunan Digitalisasi Tahun 2020-2024

Bidang Ekonomi

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Manfaat
 Transformasi Struktural berjalan lambat: - Pertumbuhan nilai tambah industri rendah - Ekspor rendah dan didominasi komoditas - Kualitas investasi rendah Revolusi <i>Industry 4.0</i> dan Ekonomi Digital - Adaptasi dan integrasi teknologi informasi rendah - Kesiapan regulasi dan infrastruktur - Kesiapan SDM	 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	 Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	☐ Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK → 15.000 orang (tahun 2024) ☐ Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0 → 60 perusahaan (tahun 2024)	 Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, daya saing dan keberlanjutan industri nasional
	 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	 Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan <i>start-up</i>	☐ Penumbuhan <i>start-up</i> → 3.500 unit (tahun 2024)	
	 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	☐ Kontribusi ekonomi digital → 4,66 % (tahun 2024) ☐ Nilai transaksi <i>e-commerce</i> → Rp 600 triliun (tahun 2024)	
	 Peningkatan ekspor dan penguatan TKDN	 Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor, <i>marketplace</i> UMKM	☐ Pertumbuhan ekspor barang dan jasa 6-8,6% (2024)	

Kebijakan Pembangunan Digitalisasi Tahun 2020-2024

Bidang SDM

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Manfaat
 - Perlindungan sosial yang belum responsive terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang - Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, peringkat 65 dari 130 negara (<i>Global Human Capital Index</i>, WEF 2017)	 Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	 Mengembangkan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Melalui Kartu Sembako Murah integrasi pemberian bantuan pangan dan energi (listrik dan tabung gas 3 kg) ke dalam satu kartu	 - Meningkatkan ketepatan dan efektivitas program sesuai Perpres tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai - Mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai mendukung industry 4.0 - Meningkatkan produktivitas naker untuk Industri 4.0 - Meningkatkan keterampilan, keahlian dan daya saing tenaga kerja
	 Peningkatan produktivitas dan daya saing	 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	☐ Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (2.000.000 orang) ☐ Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (50 persen)	

Kebijakan Pembangunan Digitalisasi Tahun 2020-2024

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Manfaat
 Maraknya serangan siber berbasis <i>malware</i>	 Menjaga stabilitas keamanan nasional	 Penguatan ketahanan dan keamanan siber	 Skor <i>Global Cyber Security Index</i> → 0,85 (tahun 2024)	 ▪ Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi serangan siber ▪ Integrasi penanggulangan serangan siber
 Pelayanan publik yang berkualitas	 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	 Pemanfaatan Tik dalam pelayanan public dan manajemen institusi	 Indeks pelayanan publik → 3,25 (rata-rata) → Kualitas manajemen	 ▪ Meningkatkan kualitas layanan publik dan manajemen institusi pemerintah

Kebijakan Pembangunan Digitalisasi Tahun 2020-2024

Bidang Infrastruktur

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Manfaat
- Masih terdapat lebih dari 4.400 desa blankspot - Persentase pengguna internet rendah (54,7%) - Rendahnya tingkat kecepatan jaringan <i>fixed broadband</i> 14 Mbps (rata-rata dunia 42,71 Mbps) dan <i>mobile broadband</i> 10 Mbps (rata-rata dunia 22,16 Mbps) - Industri TIK dalam negeri masih rendah - Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia TIK	 Transformasi digital	 Penuntasan infrastruktur TIK	☐ Cakupan jaringan serat optik (Palapa Ring) → 75% kecamatan ☐ Analog switch off → 100% siaran digital ☐ Kecepatan internet FIXED → 25 mbps MOBILE → 20 mbps ☐ Peningkatan ICT Development Index → 5,0 - 5,3	- Jaringan komunikasi broadband di seluruh desa/kelurahan, KI, KEK, dan destinasi pariwisata - Efisiensi & efektivitas pelayanan pemerintah pada masyarakat & dunia usaha
		 Pemanfaatan infrastruktur TIK	☐ 3 Start up Unicorn baru ☐ Layanan Online Untuk Petani/Nelayan ☐ Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik ☐ <i>Smart Cities</i> ☐ <i>Digital Talent Scholarship</i>	
		 Fasilitas pendukung transformasi digital	☐ Satu Data Indonesia ☐ Jaringan Intra Pemerintah ☐ Pusat Data Nasional	

Kebijakan Pembangunan Digitalisasi Tahun 2020-2024

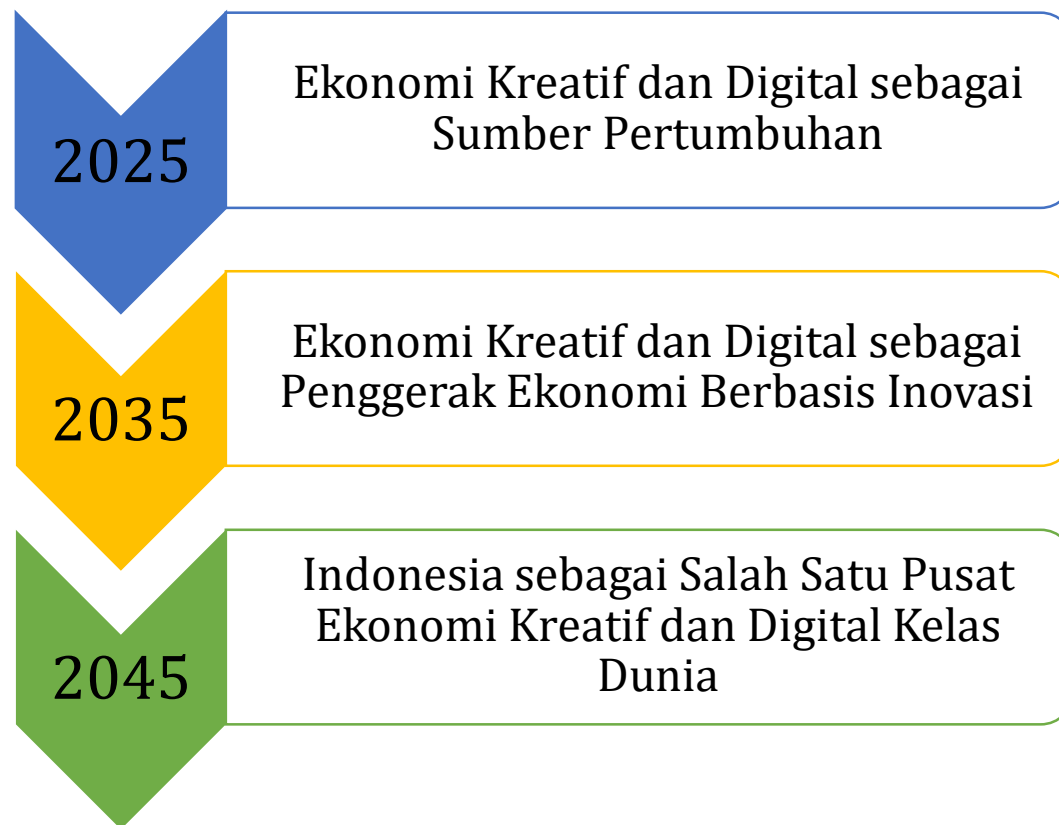
Bidang Kewilayahan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator	Manfaat
 - Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas - Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi (118 Hari → Papua) - Kepastian hukum hak atas tanah - Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani	 Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; serta peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital	 Pengembangan ekonomi wilayah melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital	 Jumlah Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital → 34 Kantor Wilayah ATR/ BPN dan 508 Kantor Pertanahan	 Meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum

Strategi Pembangunan Transformasi Digital tahun 2020-2024



Sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital





TERIMA KASIH